

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi merupakan tempat atau badan untuk sekelompok orang yang bekerja sama dengan cara yang rasional dan sistematis yang terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut, maka setiap organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini merupakan dasar untuk mencapai tujuan organisasi agar tercapai secara efektif.

Seiring berjalannya waktu, organisasi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Walaupun di zaman sekarang hampir seluruh organisasi sudah menggunakan teknologi yang canggih. Dengan adanya teknologi yang canggih pada setiap organisasi, sumber daya manusia tidak dapat dilupakan karena sumber daya manusia yang dapat mengelola teknologi dengan baik. Hal ini berlaku untuk semua organisasi, termasuk organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Organisasi perangkat daerah atau perangkat daerah merupakan lembaga pemerintah daerah yang akan membantu kepala

daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dilakukan agar organisasi perangkat daerah tersebut mampu menghasilkan hasil yang efektif bagi masyarakat setempat.

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yang berarti berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika tujuan organisasi berhasil dicapai maka efektivitas organisasi tersebut juga berhasil dicapai untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif, maka organisasi tersebut harus mampu memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Hal yang terpenting dan menjadi dasar keefektifan sebuah organisasi terletak pada sumber daya manusianya, namun sumber daya manusia juga memerlukan dorongan dari sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana, mekanisme kerja yang jelas yang harus disediakan setiap organisasi. Organisasi harus mampu mengelola dan memelihara setiap sumber daya yang tersedia, agar tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat tercapai dengan efektif.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dari tugas tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai memiliki fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang tertera dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai harus membuat dan menjalankan visi dengan

baik untuk mencapai tujuan yang efektif. Dalam menjalankan sebuah visi, maka organisasi perlu mengeluarkan misi yang harus dijalankan. Visi dan misi harus berjalan dengan maksimal demi tercapainya sebuah tujuan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki visi yaitu “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai memiliki misi yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, dan
2. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas.

Maka, tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai adalah membangun dan memperbaiki pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Dumai dengan efektif sehingga dapat memberikan pengaruh kepada instansi dan masyarakat Kota Dumai.

Hal tersebut dapat terwujud karena adanya kerjasama yang baik antara semua pihak untuk menjalankan tugas-tugas yang ada sesuai dengan bidangnya serta memiliki mekanisme kerja yang jelas dalam mewujudkan tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai. Mekanisme kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam menyusun program dan kegiatan periode 1 (satu) tahun dapat dilihat pada tabel I.1 sebagai berikut :

Tabel I.1
Standart Operasional Prosedur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan arahan kepada kasubag untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	SOP surat masuk dan surat keluar
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi Rencana Kerja (RENJA) tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan Dokumen Renja	1 hari	Format penyusunan Dokumen Renja	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Rencana Kerja (RENJA) kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan Dokumen Renja	15 menit	Draft Renja Dinas PUPR	
4.	Mengundang Kepala Dinas dan Pejabat Eselon III untuk rapat pembahasan Rencana Kerja (RENJA)					Undangan rapat	10 menit	Undangan rapat	
5.	Melaksanakan Rapat pembahasan Rencana Kerja (RENJA)					Draft Renja Dinas PUPR	2 x 2 jam	Draft Renja Dinas PUPR	SOP Pelaksanaan Rapat
6.	Menghimpun format data dan informasi Rencana Kerja (RENJA) dari masing-masing bidang dan sekretariat					Draft Renja Dinas PUPR	3 hari	Draft Renja Dinas PUPR	
7.	Menganalisis data dan informasi Rencana Kerja (RENJA) yang telah terkumpul					Draft Renja Dinas PUPR	1 hari	Draft Renja Dinas PUPR	
8.	Membuat konsep Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Draft Renja Dinas PUPR	1 hari	Draft Renja	
9.	Mengoreksi konsep Dokumen Rencana Kerja (RENJA) satu tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Ya		Draft Renja Dinas PUPR	2 hari	Dokumen Renja Dinas PUPR	
10.	Menyampaikan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) kepada Sekretaris untuk memintakan persetujuan			Tidak		Dokumen Renja Dinas PUPR	10 menit	Dokumen Renja Dinas PUPR	
11.	Penandatanganan dokumen rencana strategis lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Kepala Dinas					Dokumen Renja Dinas PUPR	5 menit	Dokumen Renja Dinas PUPR	

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2022.

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa mekanisme kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dimulai dari bagian sekretaris yang memberikan arahan kepada kasubag untuk menyusun rencana kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai. Lalu diproses oleh kasubag perencanaan dalam membuat format pengumpulan data dan informasi rencana kerja (RENJA) tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat. Kemudian untuk menyampaikan format pengumpulan data dan informasi rencana kerja (RENJA) kepada masing-masing bidang dan sekretariat yang dilaksanakan oleh sekretaris, kepala bidang, dan kasubag perencanaan. Setelah itu, diadakan rapat Kepala Dinas dan Pejabat Eselon III untuk membahas rencana kerja. Kasubag perencanaan bertugas dalam menginput format data dan

informasi rencana kerja dari masing-masing bidang dan sekretariat, menganalisis data dan informasi rencana kerja (RENJA) yang telah terkumpul, membuat konsep rencana kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dan mengoreksi konsep dokumen rencana kerja (RENJA) satu tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, dan sekretaris bertugas menyampaikan dokumen rencana kerja (RENJA) untuk meminta persetujuan oleh Kepala Dinas untuk menandatangani dokumen rencana strategi lima tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Dengan adanya mekanisme kerja yang jelas, maka diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif. Keefektifitasan program kerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dapat dilihat dari kinerja yang dihasilkan.

Berdasarkan data program kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai yang dilaksanakan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel I.2 sebagai berikut :

Tabel I.2
Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Dumai Tahun 2021

No	Unit Kerja Penanggung Jawab	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2021			Ket
					Target	Realisasi	Kinerja	
1	Bina Marga	Meningkatkan infrastruktur jalan, drainase, dan sarana pengendalian banjir.	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58.35	43.86	75.16%	Belum Tercapai
2	Cipta Karya	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk terlayani SPAM jaringan perpipaan	SR	16.23	3.551	3.551 SR	Belum Tercapai
		Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR pengelolaan dan pengembangan SPAM	SR	800	440	440 SR	Belum Tercapai
		Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya atau SPAM berbasis masyarakat	SR	17.924	4.636	4.636 SR	Belum Tercapai

		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Jumlah unit SPAM berbasis masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	200	151	151 Unit	Belum Tercapai
3	Sumber Daya Air	Meningkatkan infrastruktur jalan, drainase, dan sarana pengendalian banjir	Persentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai	%	72	72	100%	Tercapai
4	Tata Ruang	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang/kawasan/lahan/berdasarkan peraturan yang berlaku	Persentase layanan untuk penertiban surat Keterangan Rencana Kota (KRK) terhadap permohonan KRK	%	87.5	87.5	100%	Tercapai

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2022.

Pada tabel I.2 dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai pada tahun 2021 belum efektif dalam merealisasikan program kerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pernyataan ini dapat dilihat pada program kerja yang tidak terelaksanakan dengan efektif sesuai dengan target awal.

Pada tabel I.2 dapat dilihat bahwa program kerja pertama yang belum mencapai target adalah Persentase panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik yang dikerjakan oleh bidang Bina Marga dengan target 58.35, namun yang terealisasi hanya 43.86 yang menghasilkan kinerja 75.16%.

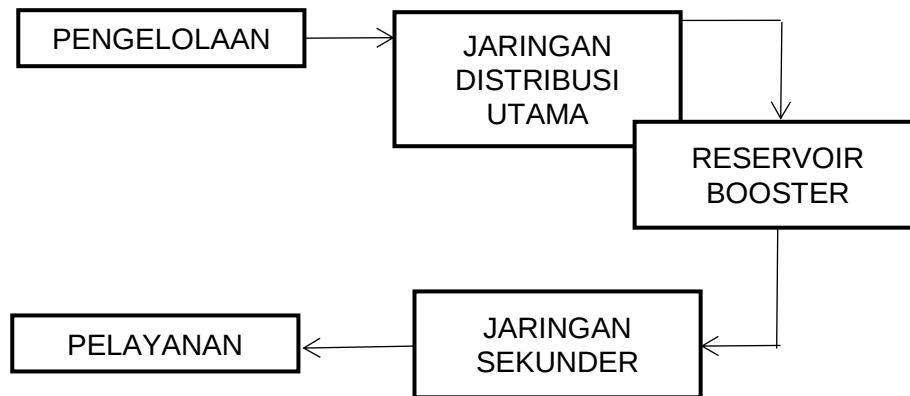
Program kedua yang belum terealisasi adalah Persentase penduduk terlayani SPAM jaringan perpipaan yang dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya dengan target 16.230SR, namun yang dapat terealisasi hanya 3.551SR yang menghasilkan kinerja 3.551SR. Program ketiga yang belum terealisasi adalah Jumlah SR pengelolaan dan pengembangan SPAM oleh bidang Cipta Karya dengan target 800 namun yang terealisasi hanya 440.

Program keempat yang belum terealisasi adalah Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis masyarakat oleh bidang Cipta Karya dengan target 17.924 namun yang terealisasi hanya 4.363. Program terakhir yang belum terealisasi adalah Jumlah unit SPAM berbasis masyarakat yang mendapatkan operasi daneliharaan oleh bidang Cipta Karya dengan target 200 unit namun yang terealisasi hanya 151 unit.

Pada tabel I.2 terdapat Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 yang belum dapat dijalankan dengan baik. Dalam menjalankan program kerja di atas, dapat dilihat bahwa bidang Cipta Karya yang masih belum mampu merealisasikan program kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai. Dalam menjalankan tugasnya bidang Cipta Karya memiliki alur untuk mengerjakan program yang terkait air bersih. Alur tersebut dapat dilihat

pada Bagan I.1:

Bagan I.1
Alur Pengelolaan Air Bersih Kota Dumai Tahun 2021



Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023

Pada bagan I.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa, proses awal yang dilakukan adalah pengelolaan sumber air bersih yang ada pada Kota Dumai yaitu Sungai Dumai. Setelah proses pengelolaan, air yang berasal dari Sungai Dumai tersebut masuk ke dalam proses jaringan distribusi utama, proses ini digunakan untuk menyalurkan air ke reservoir booster atau bak pembagi dengan menggunakan pipa besar.

Setelah proses jaringan distribusi utama selesai lanjut pada proses reservoir booster atau bak pembagi, proses ini dilakukan untuk membagi air bersih dengan kotoran-kotoran. Proses berikutnya adalah jaringan sekunder yang bertujuan untuk membagikan air ke pelanggan dengan menggunakan pipa pembagi. Proses terakhir adalah pelayanan untuk masyarakat yang menggunakan air bersih.

Pada proses pengelolaan air bersih Kota Dumai tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai mengalami kendala

dalam menjalankan proses tersebut, hal tersebut dapat diketahui melalui wawancara dengan Bapak Fahri dari Bidang Cipta Karya dengan jabatan Tenaga Ahli yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2023 sebagai berikut:

“Pada proses pengelolaan air bersih, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai masih mendapatkan kendala yaitu pada proses jaringan sekunder. Hal tersebut dikarenakan cakupan perluasan jaringan perpipaan belum 100% untuk Kota Dumai, baru lebih kurang 75%. Sehingga, perlu peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam perluasan jaringan perpipaan, agar dapat mencapai target 100% untuk Kota Dumai”.

Program kerja bidang Cipta Karya yang berkaitan dengan air minum yang tidak efektif tersebut menyebabkan masih banyak daerah di Kota Dumai yang belum dapat merasakan nikmatnya air bersih untuk kehidupan sehari-hari, namun ada beberapa daerah yang sudah terlayani air bersih. Daerah-daerah yang belum terlayani dan sudah terlayani air bersih dapat dilihat pada tabel I.3:

Tabel I.3
Data Jumlah Penduduk Yang Belum dan Sudah Terlayani Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelurahan	Jml Pddk Kota Dumai	Jml Pddk yang sudah terlayani Saat ini (jiwa)	Jml Pddk yang belum terlayani saat ini (jiwa)
1	DUMAI BARAT	Pangkalan Sesai	10,523	8,847	1,676
		Purnama	17,380	17,380	-
		Bagan Keladi	6,458	5,678	780
		Simpang Tetap darul Ichsan	10,536	10,536	-

Jumlah			44,897	42,441	2,456
2	DUMAI TIMUR	Teluk Binjai	18,940	15,588	3,352
		Tanjung Palas	11,478	11,478	-
		Jaya Mukti	20,278	17,882	2,396
		Buluh Kasap	7,045	4,849	2,196
		Bukit Batrem	13,212	13,212	-
Jumlah			70,953	63,009	7,944
3	BUKIT KAPUR	Bukit Nenas	8,716	8,716	-
		Bukit Kayu Kapur	16,196	8,571	-
		Gurun Panjang	5,512	5,512	-
		Bagan Besar	16,238	11,157	-
		Kampung Baru	7,567	7,567	-
Jumlah			54,229	41,523	-
4	SUNGAI SEMBILAN	Lubuk Gaung	11,944	11,936	-
		Tanjung Penyembal	9,512	9,512	-
		Bangsai Aceh	5,747	5,747	-
		Basilam Baru	11,244	6,163	-
		Batu Teritip	4,924	4,924	-
Jumlah			43,371	38,282	-
5	MEDANG KAMPAI	Teluk Makmur	4,620	4,628	-
		Mundam	4,182	4,182	-
		Guntung	2,057	2,057	-
		Pelintung	6,635	6,635	-
Jumlah			17,502	17,502	-
6	DUMAI KOTA	Laksaman a	3,748	2,964	-

		Rimba Sekampung	14,887	14,799	-
		Dumai Kota	7,683	5,647	-
		Bintan	6,854	5,578	-
		Sukajadi	10,050	8,422	-
		Jumlah	43,222	37,410	-
7	DUMAI SELATAN	Ratu Sima	14,744	14,344	-
		Bukit Timah	8,404	8,336	-
		Mekar Sari	6,856	6,844	-
		Bukit Datuk	12,848	10,680	-
		Bumi Ayu	11,352	9,900	-
		Jumlah	54,204	50,104	-
		Total Keseluruhan	328,378	290,271	10,100

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023.

Daerah-daerah yang belum terlayani air bersih lebih banyak dari pada daerah yang sudah mendapatkan air bersih. Hal ini dikarenakan sumber air yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai belum mampu mencapai target air yang harus keluar perharinya. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka dapat diketahui melalui wawancara dengan Bapak Fahri dari Bidang Cipta Karya dengan jabatan Tenaga Ahli yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sebagai berikut:

“Permasalahan tidak tercapainya target kerja Bidang Cipta Karya terkait air bersih karena sumber air yang berasal dari sungai masjid (air permukaan) belum mampu mencapai target keluar yaitu 50 liter/detik”.

Selain itu, program kerja yang tidak terealisasi disebabkan karena adanya hal lain yang ada pada Bidang Cipta Karya yang dapat diketahui melalui wawancara dengan Bapak Fahri dari Bidang Cipta Karya dengan

jabatan Tenaga Ahli yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

“Program air bersih yang tidak terealisasi dengan baik karena Bidang Cipta Karya belum mampu membuat sumur bor di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau jaringan distribusi PDAM”.

Maka, bidang Cipta Karya menjadi lambat dalam memberikan laporan ke bagian Perencanaan. Sehingga bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai mengalami kendala dalam penyusunan laporan kerja yang direkap per satu tahun sekali. Hal yang menjadi kendala penyusunan laporan kerja adalah keterlambatan penyerahan hasil kerja perbidang yang menjadi bahan awal untuk penyusunan laporan kerja.

Hal ini diketahui dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada Ibu Henny Rahmawati, S. Sos dengan jabatan Kasubag Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sebagai berikut :

“LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai disusun persatu tahun sekali dan didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan perpres tersebut yang menyatakan bahwa penyampaian laporan kinerja tahunan disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai berhasil mencapai target tersebut. Namun, pada saat penyusunan laporan kinerja dilakukan, ditemukan kendala yaitu terdapat keterlambatan dari bidang dalam menyerahkan laporan kerja sehingga menyebabkan tim yang menyusun laporan kinerja juga mendapatkan beban tambahan.”

Maka, kendala dalam penyusunan laporan kinerja tahunan dipengaruhi terhadap keterlambatan penyusunan laporan kinerja bidang

dan sikap serta kesiapan pegawai dalam menyelesaikannya. Hal tersebut juga tidak lepas dari disiplin pegawai untuk berkomitmen terhadap tugas yang diberikan agar dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dikaitkan dengan pelaporan yang harus direalisasikan ternyata sikap kurang disiplin dari beberapa pegawai akan menjadi sebuah kendala dalam penyusunan pelaporan, sehingga para pegawai lainnya memiliki beban kerja tambahan agar dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 1.

Sikap kurang disiplin yang terjadi pada pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dikarenakan adanya pegawai yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sikap kurang disiplin pegawai ini dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, jika pegawai negeri sipil melanggar hal tersebut maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai masih banyak yang melakukan pelanggaran jam kerja. Sehingga banyak pegawai yang terkena surat peringatan dari instansi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel I.4:

Tabel I.4
Jenis Pelanggaran dan Tingkat Presentase Pegawai Yang Terkena Surat Peringatan

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Tidak Mengikuti Apel Pagi	15	22,72%
2	Tidak Mengisi Absensi Pagi Dan Absensi Sore	20	30,30%
3	Tidak Hadir Tanpa Keterangan	25	37,88%
4	Libur/Cuti Melebihi Hari Yang Telah Ditentukan	6	9,10%
Jumlah		66	100%

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023.

Pada tabel I.4 dapat dilihat bahwa jenis pelanggaran yang menyebabkan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai mendapatkan surat peringatan. Jenis pelanggaran tidak mengikuti apel pagi memiliki presentase sebesar 22,72%, jenis pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pegawai. Jenis pelanggaran yang kedua adalah tidak mengisi absensi pagi dan absensi sore memiliki presentasi sebesar 30,30%. Tidak hadir tanpa keterangan merupakan jenis pelanggara ketiga yang memiliki bobot sebesar 37,88%. Jenis pelanggaran keempat yaitu libur/cuti melebihi hari yang telah ditentukan yang memiliki presentase sebesar 9,10%.

Akibat dari pegawai yang tidak profesional tersebut dapat diketahui dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Henny Rahmawati, S.Sos dengan jabatan Kasubag Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sebagai berikut :

“karena banyak pegawai yang tidak disiplin membuat pekerjaan mereka menjadi tertunda dan menjadi lambat, sehingga hasil kerja menjadi kurang efektif”.

Dampak yang terjadi tidak hanya pekerjaan yang lambat, namun ada dampak lainnya yang diketahui dari hasil wawancara bersama Ibu Eti Murniati dengan jabatan Pengadministrasi Kepegawaian Subbagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sebagai berikut :

“pegawai yang tidak datang menyebabkan pegawai lainnya yang datang bekerja lebih berat seperti mengerjakan pekerjaan pegawai yang tidak datang karena adanya tuntutan atasan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka gejala permasalahan yang ada yaitu :

- a Masih ditemukan program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai yang berjalan kurang efektif.
- b Masih ditemukannya tenaga kerja yang kurang profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan.

Berdasarkan gejala masalah yang ada, maka peneliti mengambil masalah pokok penelitian yaitu **“Bagaimana Efektivitas Organisasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Kota Dumai”**.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Efektivitas Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai untuk meningkatkan Efektivitas Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
- b. Sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara khusus pada kajian manajemen sumber daya manusia.
- c. Sebagai sumber acuan bagi peneliti lain ketika melakukan penelitian dengan masalah yang sama